



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD DARDIRI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 426119

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	825.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	135.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	89.046.045
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.070.046.045
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.070.046.045

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.